

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DLANGGU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif selama lima tahun kedepan, yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Kecamatan Dlanggu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 ini mampu meningkatkan kinerja organisasi serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, Maret 2020

CAMAT DLANGGU

NUNUK DJATMIKO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690701 198903 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VIII	PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur	15
2.	Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu	15
3.	Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto	17
4.	Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto	18
5.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
6.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
7.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	30
8.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021	32
9.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berkenaan dengan adanya perubahan sasaran kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021, maka perlu dilakukan perubahan juga pada dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang ditetapkannya, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Oleh karena itu Manajemen organisasi dan kinerja organisasi juga harus menyesuaikan perubahan yang ada.

Perubahan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

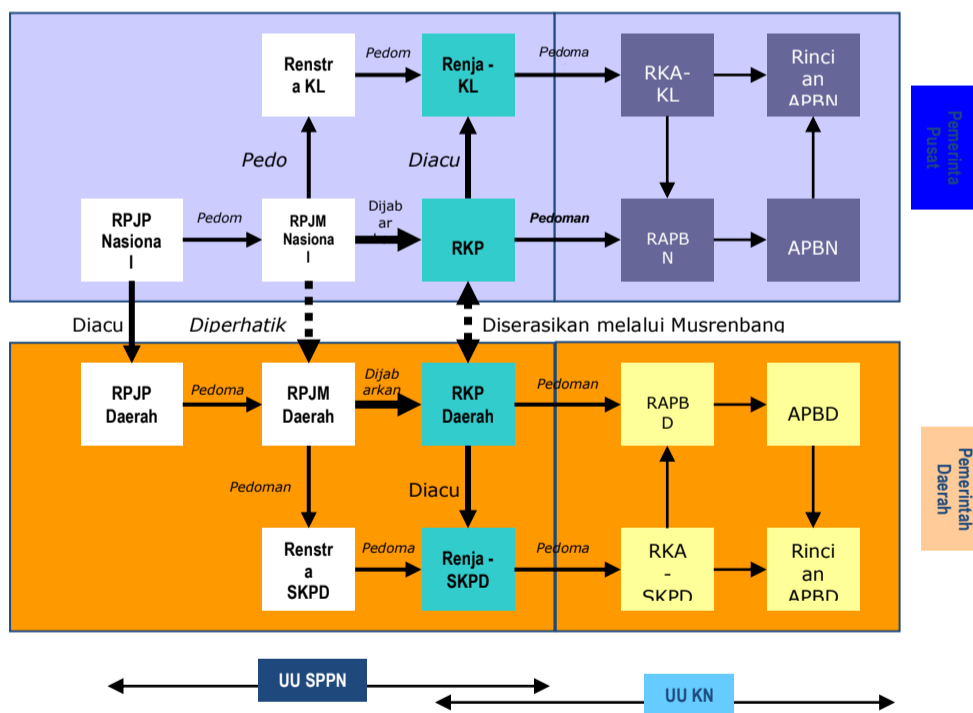
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Dlanggu juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Kecamatan Dlanggu juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dlanggu. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dlanggu dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 memiliki maksud :

1. Sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan RPJMD 2016-2021, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya Kantor Kecamatan Dlanggu memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah / Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan Kantor Kecamatan Dlanggu, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kabupaten yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Kantor Kecamatan Dlanggu berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Dlanggu.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Dlanggu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas :

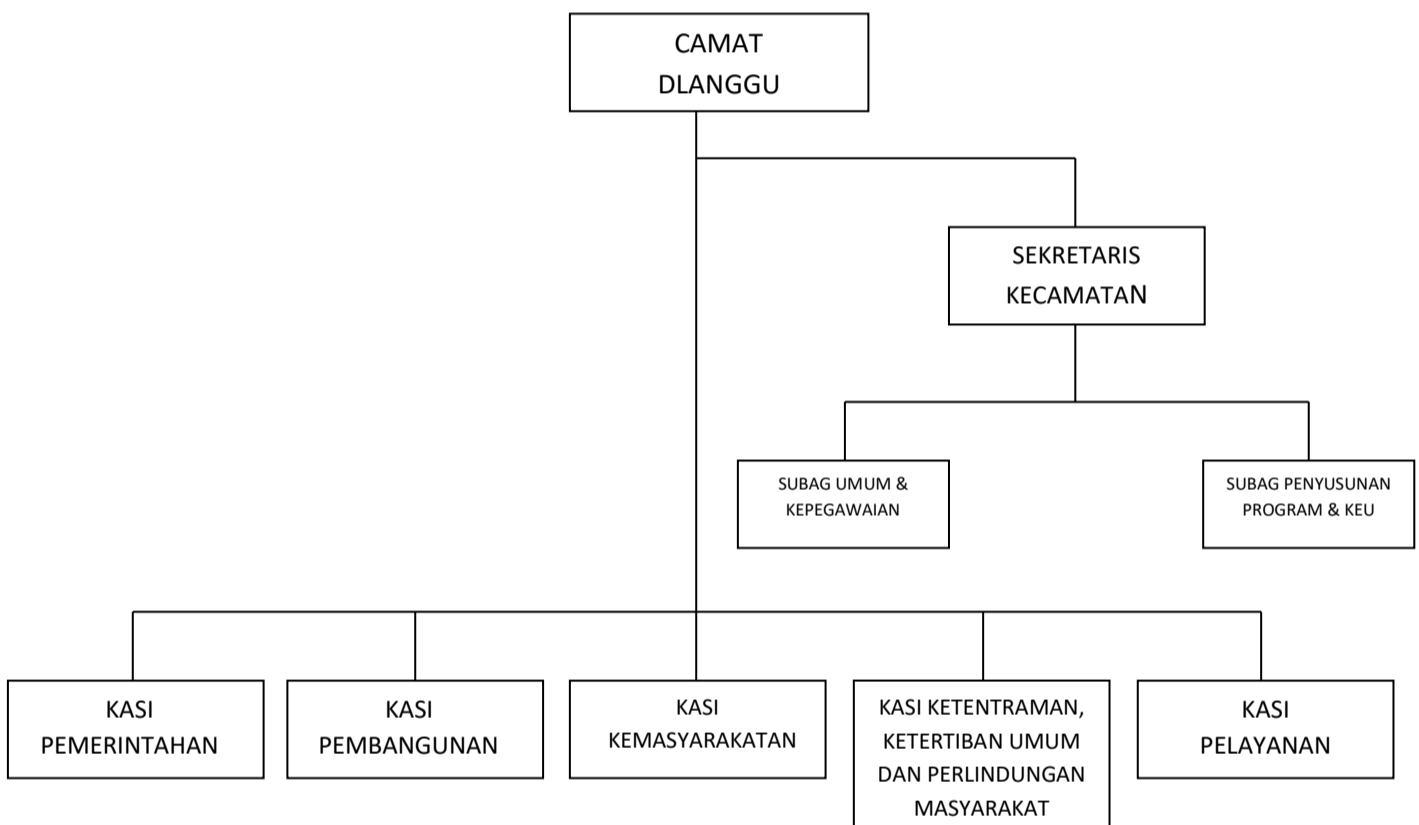
1. Camat.
2. Sekretariat

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
9. Seksi Pelayanan
10. Jabatan Fungsional Umum

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DLANGGU**



Saat ini Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional baik Perencana, Peneliti, ataupun jabatan fungsional yang lain.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu

Sumber daya Kecamatan Dlanggu yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah Pegawai Kecamatan Dlanggu berdasarkan Golongan, Jabatan/Eselonering dan Pendidikan terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

<input type="checkbox"/> Golongan IV	: 3 orang
<input type="checkbox"/> Golongan III	: 9 orang
<input type="checkbox"/> Golongan II	: 13 orang
<input type="checkbox"/> Golongan I	: 0 orang
<input type="checkbox"/> Tenaga Non Peg	: <u>2 orang</u>
Jumlah	: 27 orang

b. Berdasarkan Jabatan/Eselonering :

<input type="checkbox"/> Eselon II/A	: 0 orang
<input type="checkbox"/> Eselon III/A	: 1 orang
<input type="checkbox"/> Eselon III/B	: 1 orang
<input type="checkbox"/> Eselon IV/A	: 4 orang
<input type="checkbox"/> Eselon IV/B	: 2 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

<input type="checkbox"/> S.3	: 0 orang
<input type="checkbox"/> S.2	: 3 orang
<input type="checkbox"/> S.1	: 6 orang
<input type="checkbox"/> D.3/Sarmud	: 1 orang
<input type="checkbox"/> SLTA	: 17 orang

Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur Kecamatan Dlanggu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No.	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontra k	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	1	-	-	1
3	SLTA	2	-	12	2		16
4	Sarjana Muda	-	-	-	1	-	1
5	Sarjana	-	-	-	6	-	6
6	Pasca Sarjana	-	-	-	1	2	3
Jumlah		2	-	13	10	2	27

Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Dlanggu cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Keragaman disiplin ilmu aparatur Kecamatan Dlanggu disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu

BIDANG ILMU	TINGKAT SARJANA	TINGKAT PASCA SARJANA
PEMERINTAHAN	3	-
EKONOMI	-	1
MANAJEMEN	1	1
SOSIAL	-	1
PENDIDIKAN	-	-
HUKUM	2	-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	-
PERTANIAN	-	-
PETERNAKAN	-	-

BIDANG ILMU	TINGKAT SARJANA	TINGKAT PASCA SARJANA
KEHUTANAN	-	-
TEKNIK PLANOLOGI	-	-
TEKNIK GEODESI	-	-
STATISTIK	-	-
KOMUNIKASI	-	-
TEKNIK SIPIL	-	-
GEOFISIKA	-	-
KEBAHASAAN/SASTRA	-	-

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dlanggu dilengkapi dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- Gedung Kantor 1 buah
- Gedung Dinas Instansi 1 buah
- Rumah Dinas 1 buah
- Aula/Panti PKK 1 buah
- Musholla 1 buah
- Pendopo Kecamatan 1 buah
- Mobil Dinas 1 buah
- Sepeda motor Dinas 4 buah
- Personal Computer 3 buah,
- Laptop 8 buah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Realisasi Capaian Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persetase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	-	-	-					66%					66%	-	-	-	-	100%
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	-	-	-					1,6%					1,6%	-	-	-	-	100%

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJ A	183.92 3.500	227.860 .500	548.50 0.000	1.121.0 02.000	1.430.4 36.445	172.580. 800	218.580 .000	515.16 4.075	1.066.0 31.550	1.264.7 89.100	93,8%	95,9%	93,9%	89,7%	88,4%	21,6%	15,7%
BELANJ A OPERAS I	173.92 3.500	210.160 .500	530.50 0.000	895.300 .000	1.393.9 61.445	163.380. 000	201.080 .000	497.16 4.075	840.93 1.550	1.228.3 14.100	93,9%	95,7%	93,7%	93,9%	88,1%	35,8%	31,5%
Belanja Pegawai	38.010. 000	42.325. 000	115.040 .000	52.945. 000	67.080.0 00	29.480.0 00	40.525.0 00	102.670 .000	51.845. 000	66.630.0 00	77,6%	95,7%	89,2%	97,9%	99,3%	21,1%	22,2%
Belanja Barang	135.913 .500	167.835 .500	415.460 .000	842.355 .000	1.326.88 1.445	133.900. 000	160.555. 000	394.494 .075	789.086 .550	1.161.68 4.100	98,5%	95,7	94,9%	93,7%	87,5%	36,5%	32,1%

BELANJA MODAL	10.000.000	17.500.000	18.000.000	225.702.000	36.475.000	10.000.000	17.500.000	18.000.000	225.100.000	36.475.000	100%	100%	100%	99,7%	100%	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	10.000.000	17.500.000	18.000.000	225.702.000	36.475.000	10.000.000	17.500.000	18.000.000	225.100.000	36.475.000	100%	100%	100%	99,7%	100%	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto :

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Peluang :
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran
 4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dlanggu dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.1

(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas pelayanan publik belum memadai	Belum Optimalnya pelayanan umum dan perijinan (PATEN) dikecamatan	Kualitas sumber daya pegawai belum optimal dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan Anjab ABK
			Sarana dan prasarana kerja pendukung PATEN kurang memadai
			Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan terkait dengan kinerja pelayanan
			Belum optimalnya intensifikasi PBB di masyarakat
		Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih rendah	Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap

			program pembangunan
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	Belum optimalnya penanganan konflik sosial di kecamatan
			Belum optimalnya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Belum optimalnya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa
			Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi

mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Kecamatan Dlanggu guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Dlanggu sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Kecamatan Dlanggu berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Dlanggu dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Dlanggu yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat :

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan.
- b) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan.
- c) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
- d) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah
- e) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah
- f) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya
- g) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- h) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- i) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- j) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi :

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.

4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan)
		Sering terjadinya kebakaran
6.	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Melambatnya pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat

No.	Tema	Isu Strategis
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Meningkatkan kondusifitas keamanan dengan menurunnya angka kriminalitas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2019 – 2021, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 - 2021 adalah *Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan.*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019 – 2021. Perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal
 - Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP
2. Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
 - Persentase peningkatan intensifikasi PBB

Sedangkan sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 – 2021 adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan** dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada 2019 – 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

(Tabel T-C. 25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (2019 s/d 2021)		
				5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indek Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayai sesuai SP	79 %		
		Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1 %		
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indek Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan		79	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan		79 %	81%
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial		79 %	81%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto untuk mendukung **Misi ke-7 Bupati Mojokerto : Memperkuat Kondusifitas Ketertiban dan Keamanan serta Peningkatan Pemberian Pelayanan Prima di Semua Sektor Bagi Masyarakat**, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

(Tabel T-C. 26 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2019 dan Tahun 2020 – 2021

Visi Bupati	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan.				
Misi ke 7 Bupati	:	Memperkuat Kondusifitas Ketertiban dan Keamanan serta Peningkatan Pemberian Pelayanan Prima di Semua Sektor Bagi Masyarakat.				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal	1.	Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu yang efektif dan efisien sehingga cakupan pelayanan umum dan perijinan tercapai	1.	Peningkatan Pelayanan Publik
	2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	1.	Peningkatan kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menetapkan program-program sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	76		78		79		79		80		80		Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
	Meningkatnya pelayanan Kesekretariat an Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN	NA	76		78		79		79		80		80		Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	87.280	100%	292.000	100%	265.000	100%	261.000	100%	156.000	100%	1.061.280	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.400	12 bulan	15.000	12 Bulan	34.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 bulan	139.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dapat terbayar	1.750	2 Unit	2.000	2 Unit	2.000	2 Unit	2.000	2 Unit	2.000	2 Unit	2.000	2 Unit	10.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu

		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll	25.000	1 Paket	15.000	1 Paket	15.000	1 Paket	20.000	1 Paket	15.000	1 Paket	15.000	5 Paket	80.000	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dll	12.300	1 Paket	6.000	1 Paket	2.000	1 Paket	5.000	1 Paket	3.000	1 Paket	5.000	5 Paket	21.000	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	6.000	0	0	1 Paket	4.000	1 Paket	6.000	1 Paket	6.000	1 Paket	6.000	5 Paket	22.000	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	35.000	1 Paket	10.000	1 Paket	162.500	1 Paket	58.000	1 Paket	135.000	1 Paket	25.000	5 Paket	390.500	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	30.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	80.000	12 Bulan	20.000	12 Bulan	20.000	12 Bulan	140.000	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	35.000	12 Bulan	16.800	12 Bulan	50.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	28.000	12 Bulan	169.800	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu
		01.21	Biaya Oprasional Pelayanan KTP dan KK Gratis	Persentase pelayanan KTP KK gratis	6.000		0		0		0		0		0	0	Kec. Dlanggu	Kec. Dlanggu	

		01.23	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Jumlah penyedia an jasa tenaga kerja selama 12 bulan	12.480	1 THL	12.480	1 THL	12.500	1 THL	14.000	2 THL	25.000	2 THL	25.000	2 THL	88.980	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	84%	86%	20.100	88%	50.000	90%	50.000	92%	95.000	94%	95.000	94%	310.100	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi	0		0		0		0	2 Unit	40.000	2 Unit	40.000	4 Unit	80.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	55.000		0	3 unit	15.000	3 Unit	20.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	75.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas	35.800	1 Paket	20.100	1 Paket	25.000	1 Paket	20.000	1 Paket	25.000	1 Paket	25.000	1 Paket	115.100	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	7.500		0	1 paket	10.000	1 Paket	10.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	40.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku	84%	86%	0	88%	10.000	90%	12.000	92%	12.000	94%	12.000	94%	46.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.725	0	0	28 Stel	10.000	30 stel	12.000	30 Stel	12.000	30 Stel	12.000	30 Stel	46.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu

				yang terpenuhi															
		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	5.000	100%	10.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	51.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		06.05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	23.800	10 Dokumen	5.000	10 Dokumen	10.000	10 Dokumen	12.000	10 Dokumen	12.000	10 Dokumen	12.000	10 Dokumen	51.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standard pelayanan minimal			Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	NA	68		70		70		79		80		80		Kec. Dlanggu	
			Program Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	66%	68%	0	70%	0	70%	50.000	79%	130.000	80%	135.000	80%	315.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
			Penunjang PATEN	Jumlah waktu terselenggaranya PATEN secara prima	0		0		0	12 Bulan	50.000	12 Bulan					50.000		
		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan konflik sosial di Kecamatan	80%	80%	35.700	80%	40.000	80%	40.000	80%					115.700	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu

		15.26	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Prosentase penanganan konflik sosial di Kecamatan Dlanggu	60.000	80%	35.700	80%	40.000	80%	40.000	80%					115.700	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Persentase peningkatan intensifikasi PBB	NA	1,6 %		2%		1 %		1 %						Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat kesadaran masyarakat perdesaan taat PBB		72 %	100.000	75%	100.000	78 %	100.000	80 %					300.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah rapat pleno dan pembinaan yang dapat dilaksanakan	177.250	12 Rapat /Pembinaan	30.000	12 Rapat/ Pembinaan	30.000	12 Rapat / Pembinaan	30.000	12 Rapat / Pembinaan					90.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dapat dilaksanakan	122.750	4 Pelatihan/Sosialisasi	40.000	4 Pelatihan/Sosialisasi	40.000	4 Pelatihan/Sosialisasi	40.000	4 Pelatihan/Sosialisasi					120.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
		15.03	Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah lomba yang dilaksanakan	28.500	3 Lomba	30.000	3 Lomba	30.000	3 Lomba	30.000	3 Lomba					90.000	Kec. Dlanggu	Kec Dlanggu
	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan			Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan										79%		80%			

				Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial									79%		80%			
			Program Layanan Kesekretariatan	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai											100%			
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah											90%			
				Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah											76%			
				Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah											71,07			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen										12.000	7 Dok	12.000	Kec Dlanggu	Kec D;anggu

			Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan	Jumlah Laporan										12.000	12 Laporan	12.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu
			Ketatausahaan dan Kepegawaian Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian										251.000	12 Dok	251.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu
		15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP								274.000	79%	274.000	81%	518.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketertiban umum serta kesejahteraan sosial										79			81	
		15.01	Penunjang PATEN	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai Standar Pelayanan								45.000	560 Pelayanan	45.000	560 pelayanan	90.000	Kec Dlanggu	Kec. Dlanggu
		15.02	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa								15.000	3 Pembinaan	15.000	3 pembinaan	30.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu
		15.03	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pembangunan								15.000	3 koordinasi	15.000	3 koordinasi	30.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu

			kecamatan	desa														
		15.04	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat								70.000	24 koordinasi	70.000	24 koordinasi	140.000	Kec Dlanggu	Kec. Dlanggu
		15.05	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat								40.000	4 koordinasi	40.000	4 koordinasi	80.000	Kec Dlanggu	Kec Dlanggu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto mendukung Sasaran dari Misi ke 7 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu **Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat**. Sehingga tujuan jangka menengah dari Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

(Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun (2016 s/d 2021)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3				4	5	6	7
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	-	-	79	79	81	81

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta indikator kinerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksananya. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan aparatur Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perubahan ini sehingga dapat berhasil dengan baik.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Maret 2020

CAMAT DLANGGU

NUNUK DJATMIKO,S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690701 198903 1 008